

ABSTRAK

EVALUASI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERUTANG UNTUK
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 262/PMK.03/2010
Studi Kasus di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

Christin Theodora Natalia Ritonga
NIM: 082114121
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2012

Tujuan penelitian ini untuk memberikan penilaian terhadap jumlah PPh Pasal 21 terutang PNS di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan karena diberlakukannya *With Holding System* yang memungkinkan terjadinya ketidaktepatan dalam penentuan jumlah PPh Pasal 21 terutang.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah komparasi yang dilakukan dengan membandingkan jumlah PPh Pasal 21 terutang yang dihitung Bendahara Pemerintah pada daftar permintaan gaji pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah PPh Pasal 21 terutang yang dihitung Bendahara Pemerintah tidak tepat dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010.

ABSTRACT

**AN EVALUATION OF INCOME TAX-ARTICLE 21 OWED TO CIVIL
SERVANTS BASED ON THE REGULATION OF FINANCIAL MINISTER
NUMBER 262/PMK.03/2010**

A Case Study at Tourism and Culture Board of Yogyakarta

Christin Theodora Natalia Ritonga

NIM: 082114121

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2012

This research was aimed to give assessment to the amount of Income Tax-Article 21 owed to Civil Servants at Tourism and Culture Board of Yogyakarta. This research was conducted due to the implementation of With Holding System that likely made inaccuracy in determining the amount of Income Tax-Article 21 owed.

It was a case study. The data were gained from interviews and documents. The data were analyzed by comparing the amount of Income Tax-Article 21 owed calculated by the Government Treasurer on the employees' salary list of the Tourism and Culture Board of Yogyakarta and the amount of Income Tax-Article 21 owed calculated based on the Regulation of Financial Minister Number 262/PMK.03/2010.

The results showed that the amount of Income Tax-Article 21 owed calculated by the Government Treasurer on the employees' salary list of the Tourism and Culture Board of Yogyakarta was different from the amount of Income Tax-Article 21 owed calculated based on the Regulation of Financial Minister Number 262/PMK.03/2010